



Persepsi Generasi Milenial Terhadap Gerakan 30 September 1965

Millennial Generation's Perception of the 30 September 1965 Movement

Samson Ganda J. Silitonga

Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

Email: samson.ganda@unpar.ac.id

Correspondence: Samson Ganda J. Silitonga

DOI:

10.36418/comserva.v2i07.445

Histori Artikel

Diajukan : 01-11-2022

Diterima : 15-11-2022

Diterbitkan : 29-11-2022

ABSTRAK

Gerakan 30 September 1965 merupakan momentum perubahan Politik di Indonesia setelah Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Enam orang jenderal, ditambah seorang perwira pertama, terbunuh dalam peristiwa itu. Salah satu diantaranya KSAD, Letnan Jenderal Ahmad Yani, lima orang deputi KSAD, serta seorang pengawal Menhankam/ Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB). Pembunuh korban yang disebut 'Pahlawan Revolusi' itu adalah pasukan dari Resimen Tjakrabirawa/ Kawal Presiden yang dipimpin Letnan Kolonel Untung. Hampir 60 tahun berlalu, bagaimana persepsi generasi milenial terhadap peristiwa itu serta dampaknya terhadap suasana Politik Indonesia saat ini? Sebagai seorang pengajar Ideologi dan Politik Indonesia, saya berkepentingan mendeteksi persepsi itu untuk membangun analisis yang Up Date (mutakhir), melalui pendekatan teoretis yang paling mungkin, dan membangun simpulan baru yang relevan kendati tentative. Salah satu teori yang dipertahankan dan diperbarui adalah Perubahan Sosial dari Thomas S. Kuhn. Sejauh ini, Teori Perubahan Sosial Kuhn menandakan bahwa setiap masyarakat pasti selalu mengalami Perubahan Sosial, yang dalam dirinya yang diselimuti berbagai faktor dan Normal Science. Beberapa faktor yang disebutkan, seperti Ekonomi, Politik, Budaya dan Teknologi. Setidaknya keempat faktor itu cukup dominan, meski dalam konteks Indonesia faktor Militer dan Agama juga sangat menonjol. Harus disebutkan pula bahwa menurut Sigmund Freud (1856-1939) masyarakat lebih menentukan individu tinimbang sebaliknya. Kalau begitu, Perubahan Sosial juga disebabkan perilaku dan dinamika masyarakat ketika individu tidak lagi berpengaruh dan menentukan. Di lain pihak, masyarakat juga berhadapan dengan Negara yang tidak bersifat tunggal. Dengan demikian muncul pertanyaan, bagaimana semua unsur tersebut menjadi kondisi obyektif yang dapat dijelaskan menyeluruh? Berdasarkan kedua pendekatan inilah saya mencoba melihat persoalan lebih jauh, disertai oleh metode yang kiranya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kata kunci: Politik; Persepsi; Perubahan Sosial

ABSTRACT

The 30 September 1965 Movement was a momentum for political change in Indonesia after Independence on 17 August 1945. Six generals, plus a first officer, were killed in that incident. One of them was the KSAD, Lieutenant General Ahmad Yani, five deputies from the KSAD, as well as a bodyguard for the Minister of Defense/Chief of Staff of the Armed Forces (KSAB). The killer of the victim who was called the 'Hero of the Revolution' was a troop from the Tjakrabirawa/ Presidential Guard Regiment led by Lieutenant Colonel Untung. Almost 60 years have passed, what is the perception of the millennial generation

towards this event and its impact on the current Indonesian political atmosphere? As a teacher of Indonesian Ideology and Politics, I have an interest in detecting that perception in order to build an up-to-date analysis, using the most theoretical approach possible, and to build new conclusions that are relevant even if tentative. One theory that is maintained and updated is Social Change from Thomas S. Kuhn. So far, Kuhn's Theory of Social Change emphasizes that every society must always experience Social Change, which is covered in various factors and Normal Science. Several factors were mentioned, such as Economy, Politics, Culture and Technology. At least the four factors are quite dominant, although in the Indonesian context the military and religious factors are also very prominent. It should also be mentioned that according to Sigmund Freud (1856-1939) society determines the individual more than the other way around. If so, Social Change is also caused by the behavior and dynamics of society when individuals are no longer influential and decisive. On the other hand, society is also dealing with a state that is not single. Thus the question arises, how can all these elements become objective conditions that can be explained thoroughly? Based on these two approaches, I try to look at the problem further, accompanied by a method that seems appropriate and scientifically justifiable.

Keywords: *Political; Perception; Social Transformation*

PENDAHULUAN

Gerakan 30 September 1965 merupakan istilah yang dipopulerkan Orde Baru (Wijaya, 2014). Faktanya, gerakan itu berlangsung pada subuh 1 Oktober 1965. Tetapi Orde Baru tidak peduli fakta, dan secara post factum peristiwa itu telah diselimuti berbagai jargon, simbol dan slogan yang menentukan siasat Politik Orde Baru yang akhirnya juga menjadi sebuah kebiasaan masyarakat (Normal Science) (Sutrisno, 2005).

Gerakan itu merupakan kulminasi pertarungan Politik yang terjadi sejak akhir dekade 1950an (Hariyanto, 2006). Dikatakan demikian karena setelah World War II (1942-1945), dunia telah terbagi atas Blok Barat (pimpinan Amerika Serikat), Blok Timur (pimpinan Uni Soviet) dan Non Blok yang diprakarsai Ir. Soekarno (Kuno, 2014). Amerika Serikat merupakan Negara Kapitalis yang memimpin Negara-negara Blok Barat untuk mempertahankan diri dari pengaruh Uni Soviet yang mencoba mempengaruhi banyak Negara (berideologi) Sosialis (Kuno, 2014). Sedangkan Negara Non Blok menyatakan dirinya sebagai Non Aliansi, kendati dalam kenyataannya bisa berbeda (Fuadah, 2020).

Uni Soviet, sejak 1922 merupakan Negara Sosialis utama yang besar, dengan Russia sebagai konfederasi yang menonjol (Out, 2015). Negara ini mempraktekkan ajaran Karl Marx, meski praktek itu sepenuhnya sesuai dengan konsep Politik Vladimir Lenin. Sedangkan Amerika Serikat (sebagai Negara Kapitalis terbesar), sebenarnya didirikan tidak sesuai ajaran Adam Smith, tetapi dalam perkembangannya, mengikuti doktrin kebebasan individu sebagai penopang utama perekonomian (Nizar, 2019).

Karena itu, suka atau tidak, Amerika Serikat dan Uni Soviet harus 'berhadapan', terutama mengenai Ideologi sebagai dasar utama praktek bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2008). Tetapi pertanyaan yang lebih penting, mengapa Ideologi menjadi penting setelah Perang Dunia II hingga akhir dekade 1980an (sekitar 40 tahun) sebelum akhirnya dimenangkan Kapitalisme?

Hemat saya, kita harus meninjau kenyataan itu hingga akhir abad XVII ketika Agama tidak lagi meyakinkan mengenai segala 'urusan manusia'. Berbagai ide dan gagasan lahir bersusul-susulan,

menjadi praktek hidup dan tindakan manusia per se, sesuai konsep yang telah berkembang. Dari titik inilah muncul istilah Ideologi, yakni gagasan yang harus menjadi kenyataan oleh tindakan manusia, mulai dari keseharian yang kecil hingga hal terbesar seperti Negara (Adian, 2011).

Ketika Amerika Serikat menghadapi Malaise (*Great Depression*) pada akhir dekade 1920an, berbagai tindakan manusia diupayakan sebagai pencegahan sekaligus pemulihan. Semua tindakan itu beranjak dari doktrin kebebasan manusia, meskipun Amerika Serikat sendiri adalah sebuah Negara besar yang tidak sesuai dengan pendapat Adam Smith (Musa, 2014). Dan sebaliknya, berdirinya Uni Soviet pada 1922, merupakan konsekuensi runtuhnya Dinasti Romanov yang telah berkuasa sejak ribuan tahun. Hancurnya kekuasaan tersebut akibat Feodalisme yang merajalela di Eropa, selain bahwa Russia sendiri gagal mencapai tingkat Ekonomi yang memuaskan di level Eropa, dan juga karena kalah perang melawan Jepang (Wardah, 2020).

Sejak itulah terjadi persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang pula sempat terintervensi oleh lahirnya kekuatan Fasisme di Jerman dan Italia. (Tetapi yang disebut terakhir sebetulnya tidak dominan.) Partai NAZI di Jerman (dengan semangat “memudakan kembali”) berusaha menguasai Eropa hingga menimbulkan kebanggaan Chauvanistik; tetapi ambisi itu gagal dilakukan karena Eropa dipenuhi gagasan, sejak Perang Salib abad X-XIII hingga Aufklaerung. Ingatan terhadap banyaknya gagasan itulah yang mengakhiri perang. Tetapi Eropa adalah sumber Kapitalisme klasik (Skotlandia tempat kelahiran Adam Smith), sementara Amerika Serikat mencoba memperbaiki Eropa melalui Marshall Plan setelah PD II (Purba et al., 2021).

Amerika Serikat harus menghadapi tindak-tanduk Uni Soviet yang membangun persekutuan Negara Sosialis. Inilah yang disebut Perang Dingin, yakni perlawanan diam-diam satu sama lain, yang didasarkan persaingan Ideologi, yang berimbas pada berbagai kondisi Negara (Setiawan, 2020). Perang Korea (1950-1953) menjadi salah satu dampak perebutan pengaruh antara keduanya (Amerika Serikat dan Uni Soviet). Sementara di Indonesia, Perang Dingin mulai terasa sejak Belanda mengingkari pengembalian Papua Barat ke pangkuan Republik, yang dijanjikan pada 1956. Soekarno menyesalkan pengingkaran itu, dan Hatta mengundurkan diri pada Desember 1956.

Kedua peristiwa itu saling terkait, karena salah satu alasan pengunduran diri Hatta adalah persoalan Papua. Setelah menjalankan kekuasaan seorang diri, Soekarno memulai keinginan untuk mengembalikan Papua sembari menjalankan Demokrasi Terpimpin. Di Dalam Negeri, Soekarno bekerjasama dengan Jenderal AH. Nasution, sementara di Luar Negeri, Soekarno melobby banyak Negara Barat (termasuk Amerika Serikat). Tetapi usaha tersebut gagal, dan Presiden Amerika Serikat (John Fitzgerald Kennedy) terbunuh di Dallas pada 22 November 1963. Kemudian Soekarno menoleh kepada Negara-negara Timur, terutama Uni Soviet, Tiongkok dan Korea Utara.

Dapat dikatakan upaya Soekarno cukup berhasil dengan ‘kembalinya’ Papua Barat menjadi milik Indonesia meski dengan pertarungan Ekonomi yang sulit, yakni Free Port. Tetapi Soekarno juga berusaha konsisten dengan gagasan Non Blok yang dimulainya pada 1955 dengan ‘Dasa Sila Bandung’. Sedangkan militer berusaha memperbaiki situasi perekonomian Indonesia dengan mengambil-alih perusahaan-perusahaan eks Belanda.

Tetapi pada 1962 Jenderal AH. Nasution digantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang Anti-Komunis namun bersedia melakukan kompromi dengan gagasan NASAKOM (Nasionalis – Agama – Komunis). Pergantian itu, sebagian karena kepiawaian Ahmad Yani menghadapi pemberontakan daerah-daerah yang menolak pemberhentian Hatta. Sebagian lagi karena karakter AH. Nasution sendiri semakin berseberangan dengan sang presiden dan menolak keras Komunisme.

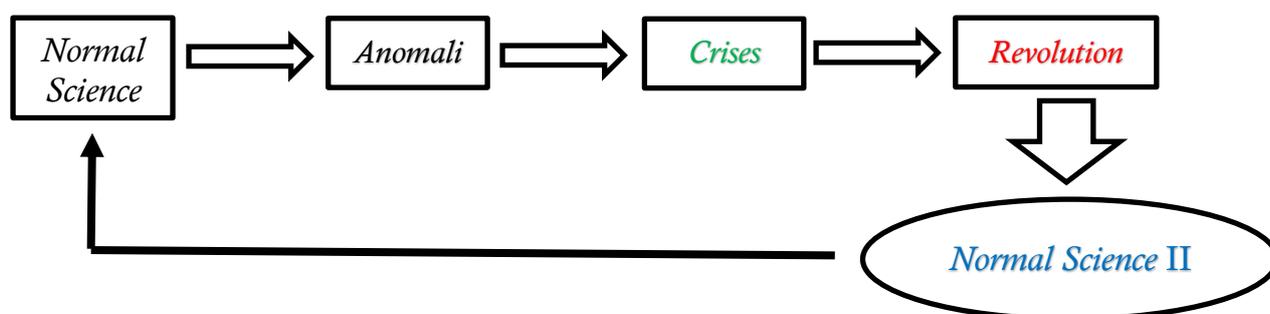
Carut-marut Politik Indonesia di sekitar Perang Dingin menjadi latar-belakang sengit bagi Gerakan 30 September 1965 (Taum, 2020). Upaya menggulingkan Soekarno terjadi sejak 1957, ketika Alain Pope tertangkap di Sulawesi setelah menerbangkan pesawat Amerika Serikat dan ambil bagian dalam PRRI/ Permesta. Dan Politik Indonesia juga diwarnai pergesekan Ideologi antara jalur Kapitalisme, Sosialisme dan Agama. Masing-masing berupaya merebut pengaruh di hadapan presiden, terutama tentang NASAKOM.

METODE

Untuk menjelaskan latar-belakang persoalan, masalah serta persepsi generasi milenial terhadap Gerakan 30 September 1965, saya memakai metode Hermeneutika Sejarah, serta Analisis Perubahan Sosial-Politik di sekitar peristiwa; juga Analisis tentang Persepsi yang dikemukakan ahli. Ketiganya berkelindan menjadi uraian yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan satu sama lain.

Selain itu, untuk meneliti persepsi generasi milenial serta orangtuanya pada masa sekarang (hampir 60 tahun setelah peristiwa itu berlalu), saya juga memakai metode pengandaian dalam berbagai pertanyaan. Para mahasiswa menyebar questioner dalam <https://docs.google.com/forms/d/1f0aeLAAHYenmIoy2CF3DTEjOaf9ei1hvhimahyHcJDs/edit?usp=s> haring yang menghasilkan 2971 jawaban Responden. Seluruh jawaban itu telah terkumpul pada 15 Oktober 2022, lalu kemudian dianalisis.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pergerakan Paradigma Thomas S. Khun, sebagai berikut:



Gambar 1. Teori Pergerakan Paradigma Thomas S. Khun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Indonesia

Apa yang diuraikan di atas (berdasarkan perubahan Paradigma Kuhn) dapat ditempatkan dalam konteks Indonesia, baik sebelum maupun sesudah Gerakan 30 September 1965. Sebelum Gerakan 30 September 1965, Indonesia mengalami efek Perang Dingin yang merupakan Normal Science (Setiyono & Triyana, 2014). Keadaan itu memberikan isyarat bagi terjadinya krisis dalam Politik Indonesia, terutama karena Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba menawarkan model kekuasaan baru (secara Sosiologis) apabila Presiden Soekarno Wafat (dengan jargon Progresif – Revolusioner). PKI pun harus berhadapan-hadapan dengan AD (Angkatan Darat) yang tidak menyetujui pembentukan Angkatan V.

Akhirnya pecahlah Gerakan 30 September 1965 dengan beberapa ‘keanehan’ yang cukup janggal, setidaknya menurut Cornell Paper. Dan selanjutnya, Soekarno dipaksa bertanggungjawab atas peristiwa itu hingga melahirkan pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara. Tetapi inti persoalan

yang sebenarnya ditagih dari Presiden Soekarno ialah Gerakan 30 September 1965 dalam kaitannya dengan morat-maritanya Ekonomi Negara, dan berpuncak pada persoalan Ideologi.

Desas-desus Politik juga merebak, mengapa Mayor Jenderal Soeharto tidak ikut diculik malam itu, sedangkan Jenderal AH. Nasution yang dianggap anggota Dewan Jenderal juga lolos dari penculikan? Pledoi Kolonel A. Latief dalam bukunya menjelaskan bahwa pada malam 30 September 1965 dirinya telah ‘melapor’ kepada Mayor Jenderal Soeharto, yang merupakan karibnya. Tetapi laporan itu tidak mendapat tanggapan serius selain ‘anggukan’. Kolonel A. Latief berpendapat bahwa Mayor Jenderal Soeharto ialah seorang loyalis Soekarno dan bukan anggota Dewan Jenderal yang harus diperhadapkan kepada Soekarno.

Selebihnya, masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Mayor Jenderal Soeharto membalas tindakan anggota Resimen Kawal Tjakrabirawa pimpinan Dewan Revolusi Indonesia, sejak 1 Oktober 1965 subuh. Juga membangun propaganda bahwa tindakan ‘biadab’ itu dilancarkan PKI. Semua anggota dan simpatisan PKI dikejar lalu dibunuh, termasuk mereka yang tetap respek dengan kepemimpinan Soekarno (Soekarno) tanpa diadili. Tidak kurang dari 2.000.000 orang terbunuh dalam pembantaian itu karena nama-namanya sudah diperoleh melalui CIA.

Pada puncaknya, selama 1966-1969 sejarah Indonesia Modern mengalami krisis yang cukup akut karena pembantaian itu. Dikatakan demikian karena pada 1926, ketika kuliah di Bandung, Soekarno sebenarnya telah ‘menemukan’ lapisan Sosial Indonesia sebenarnya terdiri dari kelompok Nasionalis (Abangan), Kelompok Agamis (Santri), dan Kelompok Sosialis, bahkan Komunis, sebagai Sosialis Radikal (Bakri, 2015). Penemuan itu terjadi tidak lama setelah imbas Malaise (Great Depression) melanda Hindia Belanda, setelah sebelumnya juga mengguncang Eropa.

Hingga Maret 1967 Soekarno mengalami krisis dalam arti sebenarnya, terutama jika diperhadapkan fakta bahwa dirinya tidak sanggup membetulkan Ekonomi Negara dalam arti sesungguhnya. Setelah menghadapi jargon sosiologis bahwa aktor Gerakan 30 September 1965 adalah PKI, sedangkan Soekarno tidak bersedia membubarkan PKI, maka peralihan rezim Soekarno ke Soeharto menjadi keniscayaan bagi bangsa Indonesia (Anshori, 2020).

Sejak 1967-1973, kekuasaan baru di Indonesia harus berhadapan dengan kondisi sulit karena perubahan orientasi dan paradigma kekuasaan baru di Indonesia tidak mudah bagi penguasa yang memaksakan peralihan karena Ideologi. Tetapi Soeharto dikelilingi para intelektual dan kaum terpelajar yang mendapatkan pendidikan barat (diantaranya adalah Mafia Berkley). Sehingga 5,5 tahun pertama Orde Baru merupakan Krisis baru yang disertai dengan Anomali. Disebut demikian, karena Orde Baru tidak konsisten menjalankan prinsip yang diusungnya sendiri, yakni penghematan dan memberantas korupsi (Hidayat, 2016). Dua peristiwa besar yang menunjukkan ketidak-konsistenan itu adalah penghentian Jenderal Polisi Hoegeng dan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Barulah pada 1973/1974 Indonesia mengalami Booming Oil yang membuat dana pembangunan melimpah dan proyek-proyek dapat dijalankan. Dapat dikatakan bahwa selama 1973 hingga 1978 (sepanjang Hamengkubuwono menjabat Wakil Presiden RI), Indonesia mengalami Revolusi (dalam paradigma Kuhn). Lalu sepanjang 1978 – 1988 (Wakil Presiden RI secara berurutan) dijabat Adam Malik dan Umar Wirahadikusuma) Indonesia mulai mengalami Normal Science II (juga dalam Paradigma Kuhn). Pada masa ini, terjadi perdebatan mengenai Asas Tunggal, Undang-undang Perkawinan serta Dwi Fungsi ABRI. Selain itu, kewajiban penggunaan helm juga langsung selesai pada 1984.

Barulah setelah 1988, kondisi di Indonesia bisa dianggap ‘selesai’ dan normal, terutama ketika Presiden Soeharto diharapkan selesai menjabat karena telah berusia 67 Tahun. Tetapi yang

bersangkutan tetap melanjutkan kekuasaan, bahkan membuka keran Kapitalisme baru, melalui kebijakan Facto Oktober 1988, yang mengizinkan pembukaan modal perbankan hingga Rp. 1 Miliar. Tetapi Soeharto mulai berjarak dari ABRI dan Golkar yang sebelumnya menjadi bampor kekuasaan.

Ketika Try Soetrisno menjabat Wakil Presiden RI tahun 1993, sang wakil tidak diberi wewenang yang cukup, bahkan tidak semestinya. Hal ini karena Try Soetrisno dianggap dianggap terlalu dipaksakan oleh Fraksi ABRI yang dikomandoi Jenderal LB. Moerdani. Sementara Presiden Soeharto sendiri mulai mengalami retak hubungan dengan ABRI, terutama setelah pembentukan ICMI pada 1992. Puncaknya adalah pada 1997, ketika Indonesia mengalami ‘guncangan’ krisis Ekonomi, dampak dari krisis serupa yang melanda Thailand dan Korea Selatan.

Beberapa pihak di Dalam Negeri ‘menyalahkan’ gagasan Demokrasi dan HAM sebagai penyebab krisis tersebut, sementara gerakan Civil Society di Indonesia belum juga tumbuh sepenuhnya. Sementara sebagian pihak lain melihat kedekatan Soeharto dengan gerakan Islam Politik Indonesia juga bukanlah sesuatu yang menguntungkan sejak 1992. Mendekati Islam Politik adalah sebuah lagu lama yang dinyanyikan berulang-ulang saat kekuasaan mulai terdesak, seperti saat menghadapi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Apakah sumbangan Islam terhadap Indonesia Modern, selain Nasionalisme pada dekade pertama dan kedua abad XX? Dan setelah Soeharto ‘lengser keprabon’ 21 Mei 1998, sampai hari ini Indonesia telah mengalami pergantian presiden sampai ke-7. Tidak dapat dibantah bahwa Gerakan 30 September 1965 itu merupakan pemicu Perubahan Sosial yang penting setelah Tanam Taksa (1830-1870) dan Kemerdekaan (17 Agustus 1945). Tetapi sebagian besar Rakyat Indonesia mungkin telah melupakan latar-belakang maupun akibat peristiwa itu. Lebih jauh lagi, dampak atas kekuasaan Orde baru (1967-1998) telah cukup dalam bagi Rakyat Indonesia, sehingga sulit dilupakan pada saat ini.

Masalah

Generasi Milenial adalah manusia yang lahir setelah kejatuhan pemerintah Orde Baru, atau antara tahun 1998 hingga sekarang (Masrina, 2018). Dengan kata lain, mereka sebenarnya tidak lagi mengalami kekuasaan Jenderal Soeharto paska kekuasaan Presiden Soekarno, atau setelah Gerakan 30 September 1965. Disebut Generasi Milenial, karena kelahiran mereka setelah abad XXI (milenium baru), dan tidak lagi merasakan pertarungan Ideologi pada abad-abad sebelumnya.

Kapitalisme telah muncul sebagai pemenang, sedangkan Agama sebagai salah satu Ideologi, bergelayut pada Kapitalisme. Namun hal itu tidak terlalu terasa karena Teknologi telah mendominasi. Kehidupan generasi milenial (untuk selanjutnya: genmil) dipengaruhi oleh kemampuan mereka menggunakan Teknologi, sementara Nilai-nilai yang dianut orang tuanya tidak lagi terlalu dihiraukan, atau terjadi gap (over lapping). Karena itu genmil sering bertikai dengan generasi sebelumnya. Selain karena Idealisme dan Nilai-nilai tadi, para orang tua itu rupanya telah memanjakan mereka. Orang tua yang pada masa mudanya cukup mengalami kesulitan hidup, berupaya tidak membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan sehingga memanjakan dengan cara yang menonjol.

Dalam kondisi sekarang, Indonesia masih menganut Pancasila sebagai Ideologi Negara maupun pandangan hidup Bangsa Indonesia. Telah dikatakan bahwa dalam masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan Ideologi Terbuka yang juga sekaligus mengandung Nilai-nilai inklusif, karena masyarakat ini dikategorikan Prismatic karena merupakan campuran antara Masyarakat Modern dan Masyarakat Tradisional. Dan soal yang dijawab melalui penelitian ini adalah, apakah persepsi generasi milenial Indonesia terhadap Gerakan 30 September 1965?

Selain itu harus dikatakan bahwa perjalanan Orde Baru selama 32 tahun, suka maupun tidak, telah menciptakan kondisi yang sama sekali tidak bersifat Ideologis bagi Bangsa dan masyarakat

Indonesia. Selama 6 (enam) tahun pertama setelah Orde Baru mulai berkuasa, pemerintah sebenarnya kehilangan orientasi, kendati selalu ditegaskan bahwa Soeharto akan mengubah haluan Ekonomi Indonesia. Negara-negara Barat tidak sepenuhnya percaya kepada penguasa baru ‘yang tidak dikenal’.

Barulah sejak booming oil 1973 pemerintah memiliki banyak uang untuk diterapkan dalam Pembangunan. Melimpahnya modal pemerintah Indonesia membuat pemerintah Jepang memanfaatkan kondisi sehingga berputarlah modal dimaksud dalam bentuk fasilitas otomotif dan pinjaman luar biasa disertai cicilan lunak. Keadaan stabil terus pula terjadi hingga 1988. Pemerintah menjalankan Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas) disertai represi yang luar biasa.

Tetapi sejak 1990 awal Presiden Soeharto mulai menghadapi konflik dengan ABRI dan Golkar yang menopangnya sejak 1968. Kondisi ini membuat Jenderal Soeharto mulai menoleh (kembali) pada kekuatan Islam Politik dengan merestui pendirian ICMI pada 1992. Sama dengan kondisi yang serupa dengan akhir dekade 1940an, atau awal 1950an, ketika DI/ TII menjadi sebuah kekuatan Politik di panggung Nasional.

Tetapi harus dipertanyakan, sepanjang 50 Tahun Indonesia merdeka, apakah sumbangan Islam terhadap Negara? Jawaban atas pertanyaan ini akan terjawab setelah Soeharto lengser pada 1998 maupun sesudahnya (hingga sekarang). Sejak 1988 pula, Soeharto menjalankan kekuasaan dengan kekuasaan pribadi dan pragmatis. Dengan kata lain, sejak 1988 hingga sekarang, perjalanan Orde Baru ditentukan oleh Ideologi separuh Kapitalisme dan separuh Pragmatisme. Keadaan itulah yang terus terjadi sampai hari ini, termasuk pada generasi milenial yang tidak lagi mengalami Orde Baru.

Persepsi

Menurut (Safitri, 2021), Persepsi ialah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi bukan penerimaan isyarat secara pasif, tetapi terbentuk melalui pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Dengan kata lain, Persepsi terbentuk melalui proses (membutuhkan waktu), disertai dengan perhatian atau fokus terhadap persoalan yang sedang dipersepsikan.

Dengan demikian, pada penelitian ini, persepsi generasi milenial terhadap Orde Baru sebenarnya diimbui waktu yang berjarak. Sedangkan Orangtuanya tidak berjarak dengan peristiwa yang diteliti. Tetapi pengetahuan dan pemahaman Orde Baru dibentuk melalui buku-buku pelajaran, cerita, pengalaman yang terungkap maupun kesan yang diperoleh dari orang lain.

Berikut di bawah merupakan beberapa hasil temuan dari proses penelitian yang peneliti lakukan.

Terkait karakteristik, siapakah Anda? Sebanyak 55,7 % Responden (atau lebih dari separuh) menjawab Generasi Muda, sedangkan 27,7% Responden menjawab Generasi Milenial. Hanya 8% Responden menjawab Angkatan 70an. Dengan kata lain, questioner ini telah memenuhi ekspektasi dengan jawaban bahwa lebih dari 75% questioner ini diisi Generasi Muda.

Kata ‘Generasi Muda’ memang diartikan lebih luas dari genmil. Mereka yang telah berusia 40an tahun juga masih layak disebut generasi muda; apalagi jika mereka terbiasa memimpin organisasi pemuda.

Sedangkan terkait identifikasi diri, sebanyak 45,5% responden menjawab sebagai Perempuan yang tinggal di Kota Besar, lalu 33,2% Responden menjawab Laki-laki yang tinggal di Kota Besar. Hanya 8,3% Responden menjawab sebagai laki-laki yang tinggal di Kota Kecil. Maka lebih dari 78% Responden kami tinggal di Kota Besar, yang sekaligus menikmati perkembangan Modernisasi dengan seluruh perangkatnya, seperti Informasi, Pendidikan, serta Teknologi. Tetapi jumlah perempuan yang tinggal di Kota Besar masih lebih banyak dibanding laki-laki.

Mengenai situasi Indonesia saat ini, sebanyak 45,9% Responden menyebutkan Indonesia mengalami perkembangan spiritual. Sebanyak 25,3% mengatakan bahwa Indonesia masih Negara terbelakang dan hanya 14,2% Responden yang Indonesia masih merupakan Negara. Perkembangan spiritual memang menjadi catatan penting, apalagi jika dikaitkan dengan pertumbuhan Islam sebagai Agama terbanyak.

Memasuki persoalan substansi, sebutan tepat untuk Peristiwa 1 Oktober 1965, sebanyak 51,2% menjawab sebagai Gerakan 30 September/PKI, sedangkan 40,1% sebagai Gestok (Gerakan 1 Oktober 1965). Angka ini menunjukkan perubahan cukup signifikan, yang mana hampir separuh Responden menunjukkan Normal Science baru atas peristiwa itu. Sedangkan ketika ditanya makna Perubahan Sosial, sebanyak 39,3% Responden sebagai Perubahan Sosial terpenting setelah Proklamasi Kemerdekaan, 20,3% Responden menyebut sebagai “Tonggak dimulainya keberhasilan Orde Baru”, sebanyak 17,8% Responden mengatakan “Saya hanya mengerti peristiwa itu dari buku dan film, dan 17,5% Responden menyatakan “Saya tidak memahami peristiwa itu”.

Apakah Responden berpikir bahwa Amerika Serikat ‘terlibat’ Gerakan 30 September 1965? Sebanyak 40,8% Responden yakin, tetapi sulit untuk membuktikan keterlibatan secara telanjang. Sebanyak 24,5% responden tidak yakin, karena keterlibatan Amerika Serikat muncul dalam banyak bidang, terutama pada dunia yang mengalami Globalisasi. Sementara 12,8% yakin, karena telah banyak analisis dan teori yang menjelaskan pengaruh Amerika Serikat, dan 12,2% tidak yakin, karena Teori Konspirasi adalah ‘teori malas’, sementara sejumlah 9,8% yakin, karena sejak Perang Dunia II Amerika Serikat memang terlibat dalam banyak peristiwa.

Apakah peristiwa 1 Oktober 1965 mempengaruhi eksistensi Pancasila? Sejumlah 69,6% Responden menjawab Ya, dan karena itulah disebut Hari Kesaktian Pancasila. Dalam kaitan ini, hari-hari besar Nasional tampaknya masih menjadi Normal Science atas masyarakat Indonesia. Tetapi 17,5% menjawab Tidak, dan menyebutkan bahwa hal itu hanya merupakan alibi (Politik) bagi Orde Baru.

Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, bidang apakah yang terpenting? Sebanyak 36,4% Responden menjawab Politik dan Ideologi; sementara 25,4% Responden menjawab Politik, Pendidikan dan Ekonomi. Sejumlah 18% Responden menjawab Politik, Sosial dan Budaya; sedangkan 17,3% Responden menjawab Politik dan Ekonomi. Berdasarkan jawaban ini, Gerakan 30 September 1965 masih dilihat sebagai persoalan Ideologi dan Politik, dan tidak dilatar-belakangi situasi Ekonomi. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa masalah Ekonomi di Indonesia tidak lebih menonjol dari soal-soal Ekonomi.

Siapakah nama-nama yang paling Anda ingat sekitar peristiwa itu? Sebanyak 30% Responden menyebutkan Soeharto dan AH. Nasution. Sedangkan 29% mengatakan yang paling diingat adalah Soekarno dan Soeharto. Hanya 17,2% Responden menyebut nama Untung, Aidit, Soeharto dan Sarwo Edhi. Meskipun tidak terlalu menonjol, Soeharto dan AH. Nasution tentunya masih diingat sebagai penumpas dan korban Gerakan tersebut; tetapi Untung, DN. Aidit dan Sarwo Edhi semakin tidak dikenang.

Terkait memori, ingatan apa yang paling melekat atas peristiwa itu? Sebanyak 31,5% responden mengatakan bahwa PKI jahat sekali dan 29,3% Responden mengatakan PKI tidak boleh di Indonesia. Sebanyak 21,4% Responden menyatakan PKI sudah 3x melakukan pemberontakan, sedangkan 11,5% Responden menyebut bahwa PKI tidak dibolehkan pada masa Globalisasi. Sisanya, Responden menyatakan bahwa sebenarnya PKI tidak terlibat.

Apakah persepsi Anda tentang Komunisme? Sebanyak 49,9% Responden atau nyaris separuh jawaban menyatakan Pancasila tidak sesuai dengan Komunisme. Hanya 19,7% Responden menyatakan

bahwa Pancasila memang bertentangan dengan Komunis. Sebanyak 16,7% responden mengatakan bahwa Komunisme ‘masih dibutuhkan sebagai penyeimbang, dan sebanyak 9,6% Responden menyebutkan bahwa Komunisme adalah partai penjahat.

Bagaimana Perkembangan Orde Baru setelah Gerakan 30 September? Sebanyak 33,3% Responden (atau seperempat) menyebut pada masa Orde Baru kehidupan sangat militeristik, dan hanya 31,7% Responden yang menyebut pada masa Orde Baru Ekonomi Indonesia membaik. Sedangkan 12,6% Responden mengatakan bahwa pada masa Orde Baru belum terjadi penyesuaian terhadap Era Teknologi, lalu 11,9% Responden menyebut bahwa pada masa Orde Baru kehidupan cukup nyaman; dan hanya 10,5% Responden mengatakan bahwa pada masa Orde Baru kehidupan tidak berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan 30 September 1965 dilatar-belakangi Perang Dingin dan Carut-marut Politik Nasional Indonesia, juga inisiatif PKI memperoleh posisi penting dalam Politik Indonesia dengan memanfaatkan situasi Ekonomi. Sejak DN. Aidit mengambil-alih kepemimpinan PKI dari tangan generasi tua, semangat memainkan peran Politik yang lebih tinggi memang menonjol. Terutama sejak posisi PKI cukup meyakinkan setelah Pemilu 1955.

Secara Psiko Sosial-intutif, Amerika Serikat dan beberapa Negara Barat diyakini terlibat dalam Gerakan itu, tetapi tidak dapat dibuktikan secara telanjang. Gerakan 30 September 1965 juga merupakan peristiwa Perubahan Sosial - Politik Indonesia terpenting setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Tanam Paksa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Thomas S. Kuhn, dan berdasarkan penelitian ini teori ini dianggap memenuhi cara pandang terhadap persepsi. Sedangkan tujuan Gerakan 30 September 1965 secara faktual bertujuan untuk mengakhiri kesulitan Ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno.

Paska Gerakan 30 September 1965, Orde mengalami kondisi pasang surut pada bidang Politik dan Ideologi. Tetapi Sejak 1992, pemerintahan Soeharto mendekati Gerakan Islam – Politik namun berujung pada lengser-nya Soeharto 21 Mei 1998. Sejak itu pula, secara fungsional dan operasional, Ideologi Indonesia terlihat sebagai perpaduan Kapitalisme dan Pragmatisme, dan hal itu dibentuk oleh tindak tanduk kekuasaan Orde Baru sejak 1988. Tetapi genmil cukup berhasil mengubah persepsi mengenai Gerakan 30 September 1965, dari perubahan nama 30 September 1965 menjadi 1 Oktober 1965.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D. G. (2011). *Setelah marxisme: Sejumlah teori ideologi kontemporer*. Penerbit Koekoesan.
- Anshori, D. S. (2020). *Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan*. Bumi Aksara.
- Bakri, S. (2015). *Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914-1942*. LKIS Pelangi Aksara.
- Fuadah, I. S. (2020). *Modul pembelajaran SMA sejarah Indonesia kelas XII: peran Indonesia dalam perdamaian dunia*.
- Hariyanto, E. (2006). *Peran politik militer (ABRI) orde baru terhadap depolitisasi politik Islam di Indonesia: Studi hegemoni politik militer orde baru terhadap politik Islam tahun 1967-1990*.
- Hidayat, U. (2016). Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid. *Asy-Syari'ah*, 18(2), 261–276.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2008). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. *Mahkamah Konstitusi*, 10–23.
- Kuno, S. J. (2014). *Monthly Archives: April 2014*.
- Masrina, D. (2018). *Wacana Tentang PKI di dalam Dua Film Dokumenter Pasca Orde Baru Karya IGP Wiranegara*. Universitas Airlangga.
- Musa, A. M. (2014). *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual*. Serambi Ilmu Semesta.
- Nizar, M. (2019). *Ekonomi Politik Internasional: Perspektif Historis dan Aktor*. Pustaka Ilmu.
- OUT, H. (2015). *Administrasi Pendidikan*.
- Purba, B., Purba, D. S., Purba, P. B., Nainggolan, P., Susanti, E., Damanik, D., Parinduri, L., Lie, D., Fajrillah, F., & Rahman, A. (2021). *Ekonomi Internasional*. Yayasan Kita Menulis.
- Safitri, H. (2021). *Persepsi Atlet Dan Pelatih Petanque Kabupaten Muaro Jambi Terhadap Kelayakan Petanque Sebagai Olahraga Yang Aman Di Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Jambi.
- Setiawan, A. (2020). *Hubungan Internasional Di Asia Timur*. UGM Pres.
- Setiyono, B., & Triyana, B. (2014). *Revolusi Belum Selesai*. Serambi Ilmu Semesta.
- Sutrisno, M. (2005). *Sejarah filsafat nusantara: alam pikiran Indonesia*. Galangpress Group.
- Taum, Y. Y. (2020). *Sastra dan politik representasi tragedi 1965 dalam negara orde baru*. Sanata Dharma University Press.
- Wardah, E. S. (2020). *Sejarah Dunia II (Dari Perang Salib sampai Arab Spring)*.
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Dalam Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(1), 137–158.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).